

SKRIPSI

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH TINGKAT II KOTA KEDIRI



AN 34 / 05

Per
P

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Disusun Oleh:

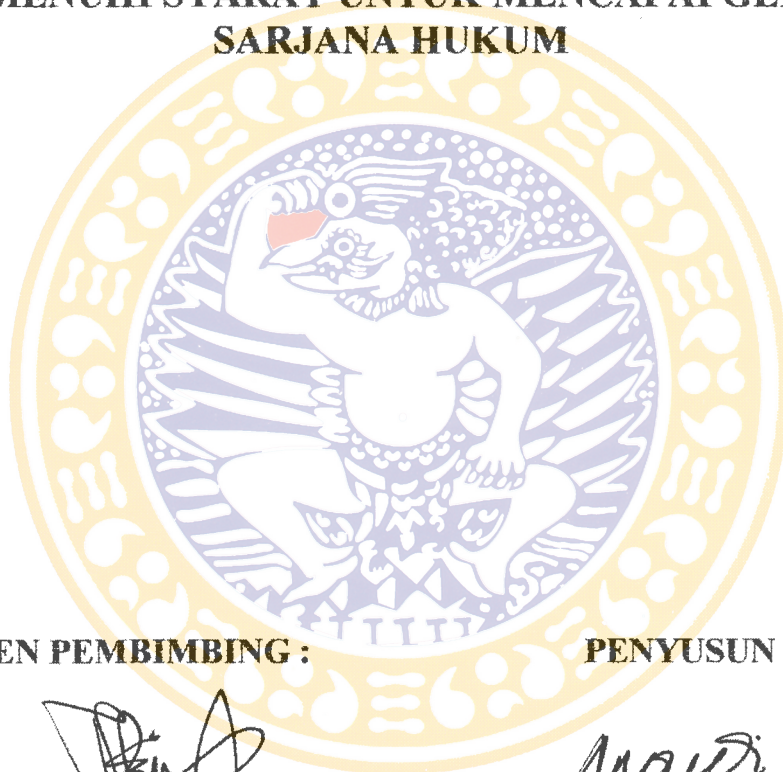
MOUDI YONAS PERMANA
039810391 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C SEBAGAI
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
DAERAH TINGKAT II KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



DOSEN PEMBIMBING :

**Rr.HERINI SITI AISYAH SH.MH
NIP.132133944**

PENYUSUN :

**MOUDI YONAS PERMANA
NIM: 039810391 U**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA HARI SELASA
TANGGAL : 8 – PEBRUARI – 2005.**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

KETUA : 1. DR.Hj. Sarwirini.SH.MS : 

ANGGOTA : 2. Rr.HeriniSitiAisyah.SH.MS : 

3. H. Soehirman Djamal.SH.MS : 

4. Sumardji.SH.M.Hum : 

5. Dedy Sutrisno.SH.MH : 

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap permasalahan yang ada, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.1. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C hingga saat ini belum dilaksanakan pemungutannya.

Realisasi penerimaan bagi hasil Retribusi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dari Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur yang saat ini nilainya kecil bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan rata-rata per tahun sebesar 0.59 % terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Apabila Pajak Daerah atas Bahan Galian Golongan C tersebut dipungut sendiri oleh Pemerintah Kota Kediri maka penerimaan Pajaknya setahun sebesar Rp. 111.600.000,- atau 210,36 % dibanding bagi hasil Retribusi pemberian Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur selama 4 tahun.

1.2. Peraturan Daerah Tingkat II Kota Kediri Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan Instruksi Gubernur Nomor 36 tahun 1994 tentang Larangan Penambangan Pasir di

sepanjang sungai Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Porong dan Kali Marmoyo serta Pengalihan Penambangan Pasir ke Gunung Kelud dan Gunung Semeru. Perebutan kewenangan pengelolaan terhadap pemungutan pajak Bahan Galian Golongan C berupa penambangan pasir di sepanjang Kali Brantas antara Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri.

Dengan ditolaknya Surat Permohonan Pemerintah Kota Kediri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur perihal Peninjauan kembali dan pencabutan Instruksi Gubernur Nomor 36 Tahun 1994, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri dalam tahun anggaran 2003/2004 kehilangan potensi sumber Penerimaan Daerah sebesar Rp. 116.000.000,-

2. Saran

Berdasarkan evaluasi dari permasalahan yang terjadi, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Agar Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri menunda sementara waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, walaupun Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi asas-asas *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori* atau *lex superior derogat legi inferiori* karena telah didukung oleh peraturan

perundang-undangan yang khusus, terbaru, sah dan memiliki kekuatan hukum.

2.2. Agar Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri melakukan pendekatan dan koordinasi sekali lagi dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan maksud agar Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 36 Tahun 1994 tersebut dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Pendekatan dan koordinasi tersebut dilakukan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri tentang siapakah pihak yang dibenarkan berwenang mengelola pajak Bahan Galian Golongan C. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX Pasal 198 ayat 2 tentang penyelesaian konflik antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Konflik ini secara otomatis akan diketahui oleh Pemerintah Pusat yang memang berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XII Pasal 218 ayat 1 tentang pengawasan terhadap kebenaran pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah